



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : PENANGANAN PANDEMI JADI FOKUS PEMERINTAH, PROYEK IKN BERPELUANG DITUNDA
Tanggal : Selasa, 07 April 2020
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 3

Bisnis, JAKARTA — Proyek pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur berpeluang ditunda karena fokus pemerintah saat ini adalah pada penanggulangan pandemi COVID-19 beserta dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Feni Freycinetia, Agne Yasa & Rinaldi M. Azka redaksi@bisnis.co. Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Ke maritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan perihal pembangunan ibu kota negara (IKN). Fokus pemerintah saat ini sebatas menjaga komunikasi dengan para calon investor yang berkaitan dengan IKN. "Arahan Presiden sudah jelas bahwa saat ini seluruh fokus pekerjaan adalah mencari cara untuk penanganan pandemi COVID-19. Penggunaan APBN pun sudah diatur dengan baik oleh menteri keuangan untuk difokuskan pada penanganan COVID-19," ujarnya, Senin (6/4). Jodi menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran pembangunan IKN yang tetap berjalan di tengah pandemi, karena bisa menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam memprioritaskan anggaran. Pasalnya, sesuai instruksi dan arahan Presiden, APBN 2020 sudah jelas diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Bahkan, kata Jodi, sangat memungkinkan juga untuk menunda proyek IKN ini sampai situasi kondusif. "Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, termasuk ibu kota negara baru bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali." Namun, sebagaimana arahan Presiden kepada para menteri, tugas pokok dan fungsinya tetap harus dijalankan maksimal di tengah pandemi ini, termasuk menjaga komunikasi dengan para investor. Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H. Sumadilaga mengatakan pihaknya belum mendengar informasi terkait pergeseran fokus pemerintah terkait dengan IKN saat ini. Namun, pada pertengahan bulan lalu dia pernah mengatakan bahwa proses penyusunan desain urban yang ditargetkan tuntas pada medio tahun ini terus berjalan normal meski kondisi saat ini tidak kondusif. Penghentian sementara proyek infrastruktur sebenarnya bisa didasarkan pada dua kebijakan, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan kepada Bisnis bahwa dua kebijakan itu saling berkaitan dalam keputusan penghentian sementara proyek infrastruktur. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa saat ini fokus penggunaan APBN 2020 adalah untuk penanganan COVID-19. Terdapat tiga prioritas yang akan dikedepankan, di antaranya kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap daya beli masyarakat, dan menjaga keberlangsungan sektor usaha, terutama UMKM. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mendesak pemerintah menunda proyek infrastruktur, termasuk pemindahan IKN. Belanja modal infrastruktur harus dialokasikan untuk penanganan virus corona. "Proyek infrastruktur dan pemindahan ibu kota baru harus ditunda, itu narasi pertama. [Pemerintah] jangan ambil anggaran untuk sumber daya manusia, termasuk dana abadi pendidikan," ujarnya ketika dihubungi, Minggu (5/4). Berdasarkan catatan Bisnis, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengalokasikan dana Rp2 triliun pada APBN 2020 untuk persiapan IKN. Besaran anggaran Rp2 triliun tersebut masuk dalam perkiraan kebutuhan dana pemindahan ibu kota sebesar Rp466 triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah bakal mengalokasikan dana untuk stimulus corona Rp405 triliun. Ekonom Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Eric Sugandi menilai pemerintah sebaiknya menunda atau bahkan menghentikan proyek infrastruktur di tingkat nasional dan daerah. Namun, ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilek menilai proyek pemindahan IKN kemungkinan berlanjut meskipun ada anggaran mendesak untuk stimulus dampak corona. (Aprianus Doni Tolok)